

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah unit eselon 1 dibawah Kementerian Keuangan yang memiliki 4 fungsi utama, yaitu mengoptimalkan penerimaan negara di bidang bea dan cukai (*revenue collector*), melakukan pengawasan, pencegahan, dan perlindungan terhadap barang – barang yang dapat membahayakan keamanan negara (*community protector*), memberikan fasilitas perdagangan melalui upaya strategis (*trade facilitator*), dan memberikan dukungan kepada industri dalam negeri (*industrial assistance*). Berdasarkan PMK 118/PMK.01/2021, terdapat 12 Direktorat yang ada di organisasi tingkat pusat DJBC, salah satunya adalah Direktorat Audit.

Direktorat Audit memiliki tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi pada bidang audit kepabeanan dan cukai. Direktorat Audit memiliki 4 Subdirektorat, 1 Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun keempat Subdirektorat yang menjalankan proses bisnis audit di Direktorat Audit antara lain: (1) Subdit Perencanaan yang mempunyai tugas *targeting* audit dan analisis tujuan tertentu; (2) Subdit Pelaksanaan Audit 1 yang melaksanakan audit kepabeanan cukai dan *joint audit*; (3) Subdit Pelaksanaan Audit

2 yang melaksanakan penelitian ulang dan e-audit; (4) Subdit Monev Pentas yang melaksanakan *monitoring&evaluasi* hasil audit, penjaminan kualitas audit dan penelitian ulang, serta pembinaan pasca audit.

Sistem pengendalian internal adalah suatu upaya yang dipengaruhi oleh dewan, manajemen, dan karyawan unit bisnis lainnya yang percaya penuh dalam mencapai tujuannya dalam hal keandalan laporan keuangan, keakuratan peraturan yang ada, efektifitas, dan juga efektifitas operasional perusahaan. perusahaan dan menetapkan kerangka kerja manajemen, termasuk sistem informasi akuntansi (AIS), sistem informasi operasional atau manajemen, dan sistem organisasi. Ini sangat penting karena Anda perlu menerapkan kontrol dan berbagai tindakan keamanan dan mengamankannya dengan kuat dalam struktur formal perusahaan Anda. Dalam hal ini, kerangka pengendalian tersebut disebut pengendalian intern atau struktur pengendalian intern (SPI).

Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur lebih lanjut terkait dari ketentuan sistem pengendalian internal dipemerintahan secara luas, serta PP. Sistem pengendalian intern dalam peraturan pemerintah ini didasarkan pada pemikiran bahwa sistem pengendalian intern bersifat unik untuk semua kegiatan, dipengaruhi oleh SDM, hanya memberikan jaminan yang wajar, dan tidak memberikan kepercayaan yang mutlak.

Berdasarkan ide ini, elemen-elemen sistem pengendalian internal dikembangkan. Sebagai pedoman pelaksanaan dan sebagai tolak ukur untuk memeriksa efektivitas penerapan sistem pengendalian intern. Pengembangan

unsur-unsur sistem pengendalian intern perlu memperhatikan aspek *cost and profit*, sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas, dan perkembangan terkait teknologi informasi, serta dilakukan secara komprehensif.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Pemantauan Pengendalian Intern Di Direktorat Audit DJBC dengan PP No. 60 Tahun 2008 Tentang SPIP?
2. Bagaimana Penerapan Dari Kegiatan Pengendalian Yang Sesuai Menurut Salah Satu Dari Unsur Sistem Pengendalian Intern Dalam PP No. 60 Tahun 2008 Tentang SPIP?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pemantauan pengendalian intern di Direktorat Audit kepabeanan dan cukai dibandingkan dengan PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan dari kegiatan pengendalian yang sesuai menurut salah satu dari unsur sistem pengendalian intern dalam PP No. 60 tahun 2008 tentang SPIP

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Pada penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis membatasi ruang lingkup penulisan pada Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 dimana membahas mengenai SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) yang diterapkan di

Direktorat Audit Kepabeanaan dan Cukai. Selain itu, penulis juga melihat dari 5 Unsur Sistem Pengendalian Intern dalam PP yang kemudian mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dilaksanakan di dalam lingkup pemerintahan bahkan negara-negara lain.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang dimana untuk penulis sendiri bermanfaat untuk mengetahui penerapan Sistem Pengendalian Internal di Pemerintahan dan juga kepada kepada auditor dapat memberikan evaluasi atas kegiatan yang telah dilakukan.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

BAB I berisikan tentang gambaran dari karya tulis tugas akhir yang berisi latar belakang, tujuan penulisan, ruang lingkup, metode pengumpulan dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II berisikan tentang landasan teori berupa penjelasan dari Peraturan pemerintah yang menyangkut mengenai pembahasan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

BAB III berisikan tentang gambaran umum objek penulisan ini, yaitu Direktorat Audit Kepabeanaan dan Cukai . Pada bab ini penulis akan memaparkan gambaran umum objek seperti profil dari Direktorat Audit Kepabeanaan dan Cukai dan juga

hasil dari wawancara dan akan dibandingkan dengan peraturan yang sudah dipaparkan pada landasan teori.

BAB IV SIMPULAN

BAB IV berisikan tentang simpulan hasil yang telah diperoleh dari tinjauan kegiatan pemantauan SPIP di Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai.